

## DARI COMMUNITY PARTICIPATION KE STAKEHOLDERS PARTICIPATION: MENEMUKAN PERSPEKTIF BARU DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

*Dwi Wulan Pujiriyani*



Judul: *Pengembangan Masyarakat*  
Penulis: *Fredian Tonny Nasdian*  
Penerbit: *Departemen Sains Komunikasi  
Pengembangan Masyarakat Fakultas  
Ekologi Manusia IPB dan Yayasan  
Pustaka Obor Indonesia*  
Tahun Terbit: *2014*  
Halaman: *xvi+317 hlm*

‘Pengembangan masyarakat’ merupakan tema yang disoroti oleh penulis buku ini yang secara tidak langsung menegaskan kembali bahwa upaya pengintegrasian masyarakat sebagai komponen yang utuh dalam sebuah sistem pembangunan bukanlah sebuah proses yang bisa sekali jadi. Proses pengembangan masyarakat adalah proses yang panjang dan terus menerus diperbarui baik dalam tataran konseptual maupun praksisnya. Tidak ada atau belum ada format baku yang bisa dikatakan benar-benar ideal untuk bisa menjawab persoalan pengintegrasian masyarakat yang menjadi bagian dari mereka yang seringkali dimarjinalkan oleh sebuah desain atau sistem yang disebut dengan ‘pembangunan’. Ife (2008:xiii) mengingatkan kembali bahwa pengembangan masyarakat adalah bagian dari upaya pemenuhan prasyarat mendasar dalam peradaban manusia yaitu kebutuhan manusia untuk dapat hidup secara harmonis dengan lingkungannya serta kebutuhan manusia untuk dapat hidup harmonis dengan sesama manusia.<sup>1</sup> Kedua hal ini merupakan esensi dari capaian dan

manfaat masyarakat modern. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi yang nyata terjadi adalah ketidaksanggupan orde dominan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Pada akhirnya yang terlihat adalah ketidakstabilan yang meningkat secara ekologis, ekonomis, politik, sosial dan kultural. Dalam konteks inilah, kebutuhan akan cara-cara alternatif untuk melakukan berbagai hal menjadi semakin penting. Telah terdapat peningkatan minat dalam pembangunan pada tingkat komunitas karena berpotensi memberikan suatu basis yang lebih dapat hidup dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk berinteraksi dengan lingkungan. ‘Pengembangan masyarakat’ mewakili suatu visis dari bagaimana berbagai hal dapat diorganisasi secara lain, sehingga keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial yang sejati yang tampaknya tidak dapat tercapai pada tingkat-tingkat global atau nasional, dapat diwujudkan dalam pengalaman komunitas manusia.

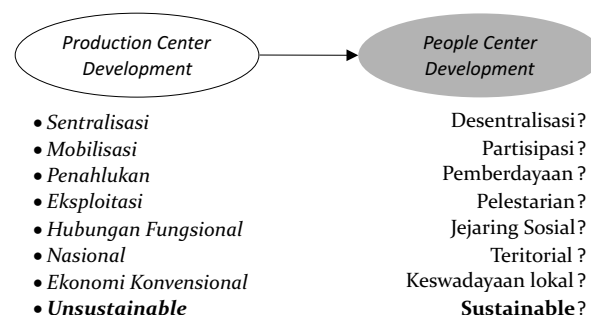
Fredian, penulis buku ini adalah seorang sosiolog yang jika ditelusuri latarbelakang pendidikan akademisnya memiliki ketertarikan pada bidang sosiologi pedesaan dan studi-studi pembangunan sosial. ‘Pengembangan masyarakat’ adalah tema yang diangkat dalam buku ini untuk menghadirkan proses-proses pengembangan masyarakat yang diharapkan dari sisi akademis dapat memberikan pemahaman untuk bisa membangun, mengembangkan dan mengkritisi konsep-konsep dan kerangka teoritis pengembangan masyarakat. Secara praktis, penulis juga mengharapkan agar buku ini bisa men-

<sup>1</sup> Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

jadi penggugah bagi pembaca untuk membangun dan mengembangkan aksi-aksi pengembangan masyarakat sebagai suatu proses, metode dan gerakan pembangunan berskala mikro. Terdapat 14 (empat belas) bagian yang dipaparkan dalam buku meliputi topik-topik mengenai: komunitas dan pengembangan masyarakat dalam perspektif sosiologi; sejarah pengembangan masyarakat; asas-asas dan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat; strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat; pemberdayaan dan partisipasi warga komunitas; metode-metode partisipatif dalam pengembangan masyarakat; pengorganisasian warga komunitas; peranan pekerja dan organisasi pengelolaan pengembangan masyarakat; membangun komunikasi dalam pengembangan masyarakat; manajemen konflik berbasis komunitas dalam pengembangan masyarakat; pengembangan kelembagaan dan modal sosial dalam pengembangan masyarakat; pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah; tanggungjawab sosial perusahaan dalam perspektif pengembangan masyarakat; serta yang terakhir mengenai peranan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengembangan masyarakat.

Pembangunan sering dianggap sebagai 'obat' terhadap berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang. Pada kenyataannya berbagai pendekatan pembangunan ternyata tidak cukup akurat secara empiris, tidak mencukupi secara terori dan tidak efektif dari segi kebijaksanaannya. Ada enam pendekatan pembangunan yang dipakai penulis untuk menggambarkan hal ini yaitu: (1) pendekatan pertumbuhan (*growth approach*); 2) pendekatan pertumbuhan dan pemerataan (*redistribution of growth approach*); 3) paradigma ketergantungan (*dependence paradigm*); 4) pendekatan tata ekonomi internasional (*the new internasional*

*economic order*); 5) pendekatan kebutuhan pokok (*the basic needs approach*), dan 6) pendekatan kemandirian (*the self reliance approach*). Logika yang dominan dipakai dari pendekatan-pendekatan pembangunan tersebut adalah logika produksi dan sasaran dominannya yang berpusat pada produksi. Nilai, sistem, dan metodenya disesuaikan dengan eksploitasi dan manipulasi sumberdaya alam untuk menghasilkan produksi bagi masyarakat konsumen massal, Logika ini menciptakan birokrasi-birokrasi besar yang mengorganisasi masyarakat ke dalam unit-unit produksi yang dikontrol secara terpusat dan bersifat sentralistis. Dampaknya adalah kebijakan pembangunan sangat berpihak terhadap konsumen, penduduk kelas menengah perkotaan dan meminggirkan para produsen yang sekaligus setengah konsumen, yakni masyarakat yang terpinggirkan (hlm. 19). Kondisi serupa ini, pada akhirnya memperlihatkan betapa upaya terbaik dalam kebijakan pembangunan, ternyata hanya menambah parah persoalan-persoalan yang sedang dipecahkan. Oleh karena itulah dibutuhkan paradigma pembangunan yang baru yang meninggalkan paradigma pembangunan untuk konsumen atau *production centered development* menjadi *people centered development* dimana masyarakat bukan semata sebagai subjek, melainkan juga sebagai 'aktor' yang mengendalikannya sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya.



Gambar. 1. Pergeseran Paradigma Pembangunan dari *Production Center Development* ke *People Center Development* (Fredian, 2014:24)

Tentu saja pergeseran paradigma pembangunan yang dimunculkan penulis ini bukanlah satu hal yang baru. Dalam konteks inilah, penulis memunculkan berbagai batasan atau pendefinisian konsep 'pengembangan masyarakat'. Konsep dasar dari 'pengembangan masyarakat' disebutkan sebagai konsep dasar yang menggarisbawahi sejumlah istilah yang digunakan sejak lama seperti: *community resource development, rural area development, community economic development, rural revitalisation, dan community based development. Community development* menggambarkan makna yang penting dari dua konsep: *community*, bermakna kualitas hubungan sosial dan *development*, perubahan ke arah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual. Tidak dijumpai satu batasan atau definisi spesifik yang digunakan penulis untuk mendefinisikan konsep 'pengembangan masyarakat'. Namun yang cukup menarik dari beberapa definisi tersebut adalah konsep yang diambil dari Sanders (1985) dimana 'pengembangan masyarakat' dapat dipandang sebagai: suatu proses, metode, program, atau gerakan. Sebagai sebuah 'proses', pengembangan masyarakat merupakan proses bergerak dalam tahapan-tahapan, dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahap-tahap berikutnya, yakni mencakup kemajuan dan perubahan dalam artian kriteria terspesifikasi. Sebagai suatu 'metode', pengembangan masyarakat merupakan satu cara untuk mencapai tujuan dengan cara sedemikian rupa sehingga tujuan dapat dicapai. Sebagai suatu 'proses', pengembangan masyarakat dinyatakan sebagai suatu gugus prosedur dan isinya dinyatakan sebagai suatu daftar kegiatan. Dengan menjalankan prosedur, kegiatan-kegiatan dianggap dilaksanakan. Sebagai suatu 'gerakan', pengembangan masyarakat merupakan suatu perjuangan sehingga ini menjadi alasan yang membuat orang-orang mengabdikan.

Berkaitan dengan pengembangan masyarakat

sebagai sebuah proses swadaya masyarakat yang diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural serta mensinergikan gerakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa, penulis menghadirkan menekankan beberapa hal yang disebut sebagai metode atau pendekatan yaitu: adanya proses pemberdayaan, partisipasi dan peranan langsung warga komunitas dalam perspektif pembangunan di tingkat komunitas dan antar-komunitas. Mengenai 'pemberdayaan', secara spesifik disebutkan bahwa pemberdayaan merupakan *the missing ingredients* dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Secara sederhana, pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumberdaya yang penting. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan tema sentral atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. *Power* yang dimiliki masyarakat berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program.

Upaya pengembangan masyarakat (*community development*) pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan warga komunitas. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok-kelompok sosial). Dalam kasus Indonesia yang lekat dengan kesenjangan ekonomi, dengan mengacu pada Friedman (1993), penulis mengungkapkan bahwa kemampuan individu 'senasib' untuk mengorganisir diri dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif di tingkat komunitas (*collective self-empowerment*). Melalui kelompok akan terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan

bersama. Melalui kehidupan kelompok, masing-masing individu belajar untuk menganalisis secara 'kritis' situasi total mereka (kelompok dan komunitasnya) termasuk dimensi politiknya dan berusaha 'memperoleh kembali' daya untuk mengubah situasi tersebut. Proses ini merupakan proses stimulasi dari *self-critical awareness* manusia akan realitas sosialnya serta menekankan pada kemampuan (daya atau kuasa) yang dimilikinya untuk mentransformasikan realitas tersebut melalui aksi kolektif mereka dengan sadar. Dalam konteks inilah digarisbawahi mengenai pentingnya peran *community workers* sebagai pendamping proses. Pendamping dalam hal ini tidak berfungsi sebagai orang yang mengajari atau menggurui individu dalam kelompok, tetapi berfungsi sebagai orang yang belajar dari kelompok. Pendamping hanya berfungsi sebagai stimulator atau pemicu diskusi. Ia harus bersikap netral dan tidak berhak mencampuri keputusan dari hasil diskusi. (hlm 98).

Sebagaimana telah disebutkan di bagian awal, bahwa buku ini diupayakan sebagai satu pemantik untuk membangun, mengembangkan dan mengkritisi konsep, buku ini memang cenderung lebih banyak menghadirkan berbagai batasan konsep, sehingga kurang memberikan potret atau contoh kasus untuk menjabarkan konsep-konsep tersebut secara lebih detail. Hal ini pula yang terlihat misalnya dalam instrumen analisis berkaitan dengan metode perencanaan partisipasi aktif. Instrumen analisis ini belum diberikan contoh penerapan atau pengaplikasiannya. Sebagai sebuah rujukan mengenai pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang dikatakan menjadi pendekatan didalamnya, buku ini cukup memberikan gambaran proses yang utuh. Hanya yang menjadi pertanyaan kemudian adalah pembahasan mengenai *stakeholder participation* sebagai bagian dari perubahan paradigma dimana tuntutan keterlibatan atau partisipasi tidak semata lagi

diarahkan kepada masyarakat namun juga kepada para pemangku kepentingan. Kehadiran konsep *stakeholder participation* ini sebenarnya menjadi bagian yang sangat menarik berkaitan dengan program-program partisipatif dalam pengembangan masyarakat dalam kelembagaan sosial (*collective action*) yang berbeda selalu berkaitan dengan upaya untuk mensinergikan swadaya komunitas lokal dan pemangku kepentingan. Bagaimana kemudian porsi partisipasi pemangku kepentingan ini diletakkan secara berimbang dengan partisipasi masyarakat sebagai kesatuan yang utuh. Sekali lagi proses pengembangan masyarakat harusnya memang tidak sekedar dilihat sebagai bagian dari proses koreksi atau mengisi kekosongan dari celah-celah yang dihasilkan dari sebuah proses pembangunan yang tidak mampu menjawab kebutuhan namun justru menciptakan disparitas sosial yang semakin tinggi, pengembangan masyarakat harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dari proses pembangunan, sebagai sistem pengendali atau kontrol dan sekaligus sebagai sistem penguatan. Pengendali dari dampak yang tidak diinginkan dan penguatan dari kapasitas untuk benar-benar bisa berswadaya dan menjadi berdaya.